

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NO.21 TAHUN1997 MENJADI UNDANG - UNDANG NO.20 TAHUN 2000TENTANG BPHTB DAN PENGARUHNYA TERHADAPPENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI



Oleh: CINDY BERTIWAHYU C.A (03620287)

Accounting

Dibuat: 2008-02-26 , dengan 3 file(s).

Keywords: BPHTB DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi dengan judul “Analisis Perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No.20 tahun 2000 Tentang BPHTB dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi.” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan BPHTB saat pemberlakuan UU No.21 Tahun 1997 dan UU No.20 Tahun 2000 (setelah perubahan UU No.21 Tahun 1997). Analisis tersebut untuk dipakai untuk mengukur seberapa besar perbandingan keadaan BPHTB saat pemberlakuan UU No.21 Tahun 1997 dan UU No.20 tahun 2000 (setelah perubahan UU No.21 Tahun 1997). Sedangkan untuk mengetahui pengaruh penerimaan BPHTB terhadap pendapatan daerah saat pemberlakuan UU No.21 Tahun 1997 dan UU No.20 Tahun 2000 (sesudah perubahan UU No.21 Tahun 1997) dengan membandingkan penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Daerah.

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan BPHTB saat pemberlakuan UU No.21 Tahun 1997 lebih baik daripada sesudah perubahan UU No.21 Tahun 1997 (UU No.20 tahun 2000). Sedangkan bila ditinjau dari pengaruhnya terhadap pendapatan daerah, saat pemberlakuan UU No.20 Tahun 2000 lebih baik dibandingkan dengan saat diberlakukannya UU No.21 Tahun 1997.

Berdasarkan hasil di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan UU No.21 Tahun 1997 menjadi UU No.20 Tahun 2000 tentang BPHTB berdampak kurang baik pada Kab.Ngawi terkait dengan penerimaan BPHTB akan tetapi penerimaan BPHTB memiliki pengaruh yang cukup besar. Oleh sebab itu diperlukan pengkajian ulang oleh pemerintah dalam penyusunan undang-undang baru baik mengenai dasar pengenaan, tarif, tata cara penghitungan BPHTB dan lain-lain sehingga nantinya tidak merugikan pihak terkait baik pemerintah maupun rakyat.

This research is a case study in Ngawi District Revenue Office with the title "Analysis of Amendment Act No.21 of 1997 into Law No.20 of 2000 and Its Effect on BPHTB terhadap Ngawi District Revenues."

The aim of the study is to examine how growth at the application of the Act BPHTB No.21 of 1997 and Law No.20 of 2000 (after a change of Law No.21 of 1997). The analysis to be used to measure the ratio BPHTB circumstances when application of the Act No.21 of 1997 and Law No.20 of 2000 (after a change of Law No.21 of 1997). Meanwhile, to determine the effect on local income BPHTB during the implementation of Law No.21 of 1997 and Law No.20 of 2000 (after a change of Law No.21 of 1997) by comparing BPHTB of Local Revenue.

Results of the analysis showed that growth during the application of the Act BPHTB No.21 of 1997 better than after a change of Law No.21 of 1997 (Act No.20 of 2000). Meanwhile, when viewed from pengaarunya of local revenues, while the implementation of Law No.20 of 2000 was better than when the enactment of Law No.21 of 1997.

Based on the above results, the authors conclude that with the change in Law No.21 of 1997 into Law No.20 of 2000 on BPHTB unfavorable impact on related Kab.Ngawi BPHTB but BPHTB have considerable influence. Therefore the review required by the government in the preparation of new legislation either on the bases, rates, procedures for counting BPHTB and others so that they would not harm stakeholders both government and the people.